

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMAD SYAFRUDIN KURNIAWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **717139**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/120 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **167.000.000**

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2PK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **25.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **99.921.841****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **1.341.921.841****III. HUTANG** Rp. **104.738.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.237.183.841**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.